

**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM LEMBAGA PERBANKAN DAN
NOTARIS DALAM PENERBITAN *COVERNOTE* SEBAGAI
DASAR PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN
DI KABUPATEN BEKASI**

INTISARI

Oleh:

Iqra Fitra Al Fikri.* Ninik Darmini.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis substansi *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris dalam praktik pemberian kredit lembaga perbankan di Kabupaten Bekasi. Kemudian, mengetahui dan menganalisis hubungan hukum antara lembaga perbankan dan notaris berkaitan dengan isi *covernote* yang dibuat. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio legal approach*. Bahan penelitian pada penelitian ini bersumber pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data-data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data-data primer serta memperoleh informasi dari subjek penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden dan narasumber. Bahan penelitian disajikan dalam bentuk teks naratif analitis dan menggunakan metode analisis bahan penelitian secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *covernote* sebagai bagian mekanisme kredit perbankan di Kabupaten Bekasi diakui keberadaannya oleh peraturan perbankan di Indonesia. Meskipun menjadi suatu hal yang penting dalam kredit, akan tetapi hal tersebut bukanlah suatu hal harus ada. *Covernote* digantungkan dalam situasi-kondisi tertentu. Bahwa substansi *covernote* yang dikeluarkan notaris atas permintaan perbankan di Bekasi berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan secara umum *covernote* pada praktik pemberian kredit di Bekasi terdapat klausul jangka waktu. Hubungan hukum antara lembaga perbankan dan notaris didasarkan pada adanya perjanjian kerja sama (PKS) dan *service level agreement* (SLA). *Covernote* merupakan pelaksanaan dari dibuatnya PKS/SLA yang seolah-olah seperti perjanjian garansi kepada bank. Notaris seakan-akan menjadi pihak penanggung/penjamin atas suatu kewenangan yang bukan dimilikinya. Seharusnya, perikatan dari substansi *covernote* terlebih dahulu dilihat dari subjek hukum yang berkepentingan.

Kata Kunci: *Hubungan Hukum, Notaris, Lembaga Perbankan, Kredit, Covernote*

* Mahasiswa Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Gadjah Mada.

** Dosen Pembimbing Penulisan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

ANALYSIS OF THE LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN BANKING INSTITUTIONS AND NOTARIES IN THE ISSUANCE OF COVERNOTES AS THE BASIS FOR GRANTING BANK LOANS IN BEKASI DISTRICT

ABSTRACT

By:

Iqra Fitra Al Fikri. * Ninik Darmini. **

This study aims to determine and analyze the substance of the covernote issued by a notary in the practice of granting credit to banking institutions in Bekasi Regency. Then, to know and analyze the legal relationship between banking institutions and notaries related to the contents of the covernote made.

This research uses a type of empirical juridical research method with a socio legal approach. The research materials in this research are sourced from library research and field research. Library research aims to obtain secondary data. The secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Meanwhile, field research is research conducted directly to the research location to obtain primary data and obtain information from research subjects related to the research topic. The primary data is obtained through direct interviews with respondents and sources. The research material is presented in the form of analytical narrative text and uses a qualitative analysis method of analyzing research material.

The research results showed that the position of covernotes as part of the banking credit mechanism in Bekasi Regency is recognized by banking regulations in Indonesia. Although it is an important thing in credit, it is not something that must exist. Covernote is hung in certain situations. The substance of the covernote issued by a notary at the request of banks in Bekasi varies. This is because in general, the covernote in the practice of granting credit in Bekasi contains a time period clause. The legal relationship between banking institutions and notaries is based on the existence of a cooperation agreement (PKS) and service level agreement (SLA). Covernote is the implementation of the PKS / SLA which is like a guarantee agreement to the bank. The notary seems to be the insurer/guarantor of an authority that he does not have. Supposedly, the engagement of the covernote substance should first be seen from the legal subject concerned.

Keywords: *Legal Relationship, Notary, Banking Institution, Credit, Covernote*

* Postgraduate Program Student, Faculty of Law, Gadjah Mada.

** Supervisor of Legal Writing, Faculty of Law, Gadjah Mada University.